

**JAWABAN DAN TAMBAHAN PENJELASAN ATAS
PERTANYAAN, SARAN, HIMBAUAN DAN PENDAPAT FRAKSI-
FRAKSI DPRD KABUPATEN KEBUMEN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Ysh. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, Kepala Kepolisian Resor Kebumen, dan Komandan Kodim 0709 Kebumen atau yang mewakili.

Ysh. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Para Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Satpol PP, para Kepala Bagian, dan para Camat se Kabupaten Kebumen, wartawan media cetak maupun elektronik, hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD serta pendengar Radio In FM dan pemirsa Kebumen TV yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subkhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026 kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Bupati atas Pandangan Umum

Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam keadaan sehat wal afiat tiada halangan suatu apapun.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya tentang jawaban atas pertanyaan, saran, himbauan dan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kebumen kami sampaikan dengan tata urutan sebagai berikut :

I. JAWABAN / TANGGAPAN DAN TAMBAHAN PENJELASAN ATAS PERTANYAAN, SARAN, HIMBAUAN SERTA PENDAPAT DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT-RAPAT PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI.

A. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

1. Terhadap pencermatan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait anggaran kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spiritual, kami sampaikan terima kasih. Penurunan belanja pada kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi usulan, pemenuhan persyaratan penerima, serta prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap harapan untuk penataan kembali alokasi belanja tersebut, Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD akan mencermati kembali prioritas belanja dalam

tahap pembahasan selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Terhadap pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami sampaikan terima kasih. Kami sependapat bahwa alokasi kenaikan belanja daerah harus diprioritaskan untuk menggerakkan sektor perekonomian masyarakat secara langsung. Penambahan belanja ini diarahkan pada percepatan program pemenuhan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta telah membatasi alokasi belanja birokrasi yang bersifat konsumtif agar memberikan dampak riil bagi masyarakat Kebumen.
3. Terkait relevansi pergeseran anggaran terhadap Prioritas Pembangunan 2026, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah memastikan pergeseran anggaran dalam Perubahan APBD 2026 tetap mengacu pada pencapaian target indikator utama 5 Prioritas Pembangunan Daerah.
4. Terhadap permintaan penjelasan terkait komponen pembentukan SiLPA TA 2025 sebesar Rp221,11 miliar, dapat kami sampaikan bahwa SiLPA tersebut merupakan akumulasi dari beberapa komponen, meliputi pelampauan pendapatan, sisa penghematan atau efisiensi belanja, serta sisa anggaran dari kegiatan yang tidak atau belum seluruhnya dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Adapun rincian SiLPA TA 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Terserap sebesar Rp93,63 miliar atau 42,34%.
 - b. Sisa Dana Transfer Terikat dan Mandatory sebesar Rp64,07 miliar atau 28,98%.
 - c. Kas BLUD, Dana BOS, dan Dana BOK sebesar Rp35,95 miliar atau 16,26%.
 - d. Penghematan Belanja dan Sisa Efisiensi Tender sebesar Rp21,91 miliar atau 9,91%.
 - e. Pelampauan Target Pendapatan Daerah sebesar Rp5,56 miliar atau 2,52%.
5. Terhadap penggunaan estimasi SiLPA untuk menutup defisit anggaran, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan mekanisme yang sah dan aman sesuai peraturan perundang-undangan karena memanfaatkan sisa dana milik daerah tanpa menimbulkan beban atau risiko fiskal luar. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Daerah juga terus mengoptimalkan efisiensi dan intensifikasi pendapatan daerah agar tidak bergantung sepenuhnya pada pembiayaan SiLPA.
6. Terhadap pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami sampaikan terima kasih. Kami sependapat dan berkomitmen penuh untuk mengawal pelaksanaan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar terealisasi secara maksimal, berorientasi pada hasil, serta memenuhi indikator sasaran pembangunan. Untuk memastikan seluruh program fisik maupun non-fisik berjalan sesuai

perencanaan dan selesai tepat waktu, Pemerintah Daerah akan terus memperkuat monitoring, evaluasi, dan pengendalian berkala di setiap Perangkat Daerah dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

B. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Terima kasih atas pencermatan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terkait penurunan target Pajak Daerah Tahun 2026 sebesar Rp7.418.555.916,00 (tujuh miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah), dapat kami jelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan realisasi penerimaan serta adanya kebijakan yang berpengaruh terhadap potensi penerimaan Pajak Daerah. Penyesuaian target tersebut terdiri atas:
 - Kenaikan target pajak sebesar Rp3.212.000.000,00 (tiga milyar dua ratus dua belas juta rupiah) pada 2 (dua) jenis pajak, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
 - Penurunan target pajak sebesar Rp10.630.555.916,00 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus

lima puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah), antara lain pada:

- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa pemberian diskon sebesar 5% (lima persen) atas besaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sejak tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026;
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang dilakukan dengan mempertimbangkan tren realisasi penerimaan periode Januari sampai dengan Juli 2026 serta capaian realisasi Tahun 2025 sebesar Rp24.022.176.500,00 (dua puluh empat milyar dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), atau sebesar 82,74% dari target Tahun 2025.

Dengan demikian, koreksi target Pajak Daerah tersebut merupakan langkah penyesuaian target berdasarkan perkembangan realisasi penerimaan dan faktor kebijakan yang mempengaruhi potensi pendapatan, sehingga target yang ditetapkan dapat lebih realistis dan terukur. Penyesuaian target tersebut tidak mengurangi komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi PAD, termasuk melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi potensi pendapatan, dan penanganan piutang daerah.

Selanjutnya, atas kenaikan target Retribusi Daerah sebesar Rp15.776.690.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), disebabkan adanya penyesuaian target pendapatan BLUD dan beberapa OPD berdasarkan perkembangan potensi pendapatan masing-masing.

Dalam rangka optimalisasi peningkatan PAD dan penanganan piutang, Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. memberikan kebijakan insentif fiskal daerah kepada wajib pajak daerah melalui pembebasan denda PBB dan pemberian diskon pokok ketetapan piutang PBB;
- c. melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kebumen, melalui Surat Kuasa Khusus untuk melakukan penagihan piutang Pajak Daerah; dan
- d. melakukan inventarisasi dan optimalisasi tanah, bangunan, dan aset *idle* yang dapat disewakan, dikerjasamakan, atau dikembangkan untuk meningkatkan PAD.

Pemerintah Daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap target dan realisasi pendapatan daerah serta mengoptimalkan seluruh potensi PAD yang tersedia, sehingga pengelolaan pendapatan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, realistis, dan berkelanjutan.

2. Terhadap permintaan penjelasan terkait Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dapat kami sampaikan bahwa di Kabupaten Kebumen terdapat 8 (delapan) BUMD, yang terdiri atas 4 (empat) BUMD dengan seluruh saham dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen dan 4 (empat) BUMD dengan kepemilikan saham bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi keuangan masing-masing BUMD berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 sebagaimana data terlampir.

Terkait Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2026, pada prinsipnya penganggarannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Pada saat penyusunan dan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Daerah tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ditetapkan, sehingga Penyertaan Modal Daerah belum dapat dianggarkan.

Tidak dianggarkannya Penyertaan Modal Daerah pada Tahun Anggaran 2026 tidak berarti Pemerintah Daerah menghentikan strategi penguatan BUMD. Rencana penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya setelah Peraturan Daerah ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan BUMD, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penetapan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disesuaikan dengan proyeksi

hasil usaha dan kemampuan masing-masing BUMD dalam memberikan kontribusi kepada Pendapatan Daerah.

3. Terima kasih atas pencermatan yang disampaikan, Pemerintah Daerah sependapat bahwa peningkatan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan tidak boleh dimaknai sebagai upaya meningkatkan beban masyarakat maupun sebagai dorongan terhadap peningkatan angka kesakitan.

Target retribusi pelayanan kesehatan disusun berdasarkan potensi dan proyeksi pemanfaatan layanan serta ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Peningkatan target retribusi juga tidak serta-merta diikuti dengan kenaikan tarif pelayanan kesehatan.

Pemerintah Daerah akan terus mendorong peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan, disertai pengendalian serta evaluasi secara berkala agar pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan tetap sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesehatan masyarakat.

4. Terhadap penyesuaian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dapat kami jelaskan bahwa penyesuaian anggaran hibah dan bantuan sosial dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi usulan, evaluasi pemenuhan persyaratan penerima, serta

penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, penyesuaian tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi keberpihakan Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

Khusus untuk Belanja Hibah pada Kegiatan Fasilitas Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat, dari anggaran murni sebesar Rp10.756.707.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 168 (seratus enam puluh delapan) lembaga, berdasarkan hasil evaluasi terdapat 2 (dua) lembaga dengan total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya, sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembaga dengan nilai Rp5.874.000.000,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) diusulkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 setelah dilaksanakan evaluasi dan cek lapangan. Adapun 38 (tiga puluh delapan) lembaga dengan nilai Rp4.282.707.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)

berdasarkan hasil evaluasi antara lain telah menerima hibah pada Tahun 2025, kondisi bangunan telah memenuhi kebutuhan ibadah sehingga tidak termasuk kategori mendesak, belum memiliki legalitas lembaga, dan/atau belum memiliki bangunan fisik sebagai objek hibah yang jelas.

Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi dan evaluasi untuk memastikan bahwa pemberian hibah memenuhi persyaratan, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Terkait permintaan Fraksi PKB mengenai daftar rinci *by name by address* penerima hibah dan bantuan sosial yang terdampak penyesuaian sebagaimana terlampir.

5. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap keberlanjutan pemberian pinjaman daerah kepada Gabungan Kelompok Tani dan dana bergulir bagi nelayan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap penguatan permodalan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha pertanian dan perikanan.

Pemerintah Daerah sependapat bahwa pengelolaan dana bergulir harus dilaksanakan secara hati-hati, tepat sasaran, transparan, serta disertai mekanisme monitoring dan pengembalian yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan piutang di kemudian hari.

Sebagai bentuk pengendalian, Pemerintah Daerah melakukan seleksi penerima, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memastikan

pemanfaatan dana sesuai dengan RAB dan ketentuan yang berlaku.

Adapun berdasarkan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah sejak Tahun 2025, tingkat pengembalian (*collection rate*) dana bergulir kepada kelompok penerima tercatat 100% dan dikembalikan tepat waktu. Khusus dana bergulir kepada Rukun Nelayan, pengembalian juga berjalan sesuai ketentuan, yaitu telah dikembalikan ke Kas Daerah sebelum tanggal 20 Desember setiap tahunnya.

Pemerintah Daerah akan terus mempertahankan dan memperkuat tata kelola, monitoring, serta mekanisme pengembalian dana bergulir sebagai upaya mencegah terjadinya piutang macet dan menjaga keberlanjutan program.

C. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

1. Terima kasih atas apresiasi dan pemahaman terhadap upaya penyusunan Raperda Perubahan APBD TA 2026. Tambahan belanja daerah sebesar Rp134,35 miliar telah diarahkan secara optimal pada program-program prioritas daerah. Peningkatan belanja ini difokuskan pada pemenuhan target indikator kinerja utama, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan sarana pelayanan publik, dan program penanggulangan kemiskinan dengan indikator hasil yang

terukur demi memastikan kemanfaatannya langsung dirasakan oleh masyarakat.

2. Terhadap permintaan penjelasan program kegiatan dan prioritas yang dibiayai dari SiLPA serta besaran alokasi anggarannya dapat kami sampaikan bahwa SiLPA tersebut dialokasikan untuk belanja yang sifatnya mandatory dan non mandatory dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SiLPA yang sudah diproyeksikan di APBD murni tahun 2026 sebesar Rp92.585.069.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - b. SiLPA mandatory sebesar Rp76.736.135.286,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
 - c. SiLPA BOS dan BOK menjadi pengurang alokasi Pendapatan DAK Non Fisik 2025 Rp727.467.962,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
 - d. SiLPA yang dapat digunakan untuk membiayai Perubahan 2026 sebesar Rp51.066.227.840,00 (lima puluh satu miliar enam puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

3. Terhadap permintaan penjelasan terkait penyebab turunnya target pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta strategi konkret dalam mengoptimalkan potensi PAD dapat kami sampaikan sebagai berikut :

a. terdapat kenaikan target pajak sebesar Rp.3.212.000.000,00 (tiga miliar dua ratus dua belas juta rupiah) pada 2 jenis pajak BPHTB dan PBJT

b. terdapat penurunan target pajak sebesar Rp.10.630.555.916,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah) pada jenis pajak :

1) Opsen PKB

disebabkan karena terdapat kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pemberian diskon sebesar 5% yang berlaku 20 Februari 2026 s.d 31 Desember 2026 atas besaran Pajak Kendaraan Bermotor

2) Opsen BBNKB

Penyesuaian target opsen BBNKB dengan mengacu trend realisasi pada tahun 2026 bulan Januari 2026 s.d 31 Juli 2026 dan hasil realisasi tahun 2025 yang hanya mencapai Rp.24.022.176.500,00 (dua puluh empat miliar dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau 82,74% dari target 2025.

- c. Atas kenaikan retribusi daerah sebesar Rp15,78 miliar adanya penyesuaian target pendapatan BLUD dan beberapa OPD
- d. Strategi optimalisasi peningkatan PAD dan Penanganan Piutang :
 - 1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2) Pemberian kebijakan insentif fiskal daerah kepada wajib pajak daerah melalui pembebasan denda PBB dan diskon pokok ketetapan piutang PBB;
 - 3) Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kebumen melalui Surat Kuasa Khusus untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah;
 - 4) Inventarisir tanah / bangunan / aset idle yang dapat disewakan, dikerjasamakan, atau dikembangkan.
- 4. Terhadap permintaan penjelasan mengenai dasar evaluasi dan prioritas pengurangan anggaran belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan khusus, serta dampaknya terhadap pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan di desa dapat kami sampaikan bahwa pengurangan anggaran belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan khusus dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi usulan, pemenuhan persyaratan penerima, serta prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah tetap memberikan

perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan di desa.

5. Terhadap permintaan penjelasan tentang prioritas penggunaan tambahan anggaran belanja modal semula Rp65,72 miliar menjadi Rp359,23 miliar, dapat kami sampaikan tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk penanganan dan peningkatan infrastruktur dasar, khususnya jalan, jaringan, dan irigasi yang mendukung konektivitas, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi. Pemerintah Daerah akan memastikan pelaksanaan pekerjaan memperhatikan kesiapan pelaksanaan, target penyelesaian pada sisa tahun anggaran, kualitas pekerjaan, serta pengendalian progres fisik dan keuangan, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Terhadap masukan agar setiap tambahan anggaran memiliki target kinerja yang jelas, indikator hasil yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kami sampaikan terimakasih.

D. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Golkar Demokrat

1. Terhadap apresiasi atas upaya Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan APBD dengan perkembangan kondisi dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, kami sampaikan terimakasih.
2. Terhadap pencermatan bahwa struktur pendapatan masih cukup bergantung pada dana transfer , kami sampaikan terima kasih. Kami sepakat bahwa hal ini merupakan perhatian utama yang harus segera diatasi. Pemerintah Kabupaten Kebumen akan terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai program, termasuk ekstensifikasi (perluasan basis pajak) dan intensifikasi (peningkatan efisiensi pemungutan pajak) PAD untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten kebumen.
3. Terhadap perhatian Partai Golkar- Demokrat atas peningkatan anggaran yang diarahkan pada pelayanan dasar, khususnya pendidikan sebesar 34,96 persen, kesehatan 19,41 persen, serta pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 8,20 persen kami sampaikan terima kasih.
4. Terhadap pencermatan penggunaan SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp221,115 miliar sebagai sumber utama pembiayaan untuk menutup defisit Perubahan APBD 2026, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya terkait penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SiLPA) untuk menutup defisit anggaran agar dikelola secara hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal, kami perhatikan dalam pelaksanaannya.

5. Terhadap strategi Pemerintah Kabupaten Kebumen memastikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, sekaligus memastikan tambahan belanja dan penggunaan SiLPA benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi petani dan nelayan dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui :
 - a. Simplifikasi dan Penguatan PDRD melalui restrukturisasi serta pengaturan pajak dan retribusi daerah.
 - b. Peningkatan Sosialisasi pemungutan pendapatan daerah kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek hukum dan kemampuan ekonomi.
 - c. Intensifikasi Pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya.
 - d. Penagihan Piutang Pajak secara intensif terhadap kewajiban yang belum dibayarkan.

- e. Ekstensifikasi Sumber Baru dengan memperluas basis wajib pajak seiring pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Penyesuaian Tarif pajak daerah dan retribusi dengan tetap menjaga daya dukung perekonomian.
- g. Optimalisasi Aset Daerah melalui inventarisasi, revitalisasi, dan pemanfaatan aset bernilai ekonomi sesuai aturan.
- h. Peningkatan Pelayanan Publik bagi masyarakat sebagai wajib pajak agar lebih mudah, cepat, dan berkualitas.
- i. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan pendapatan agar lebih transparan dan akuntabel.
- j. Elektronifikasi Transaksi Daerah untuk efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemungutan pajak/retribusi.
- k. Penguatan Kerjasama Pemanfaatan Aset antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha.
- l. Peningkatan Layanan Perizinan dan Investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- m. Optimalisasi BUMD melalui pembinaan, koordinasi, dan penyertaan modal agar kontribusi deviden pada PAD meningkat.
- n. Penguatan BLUD dengan peningkatan kualitas layanan dan pengembangan jenis layanan baru.

- o. Peningkatan Profesionalisme SDM aparatur pendapatan serta pengelola pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen memastikan tambahan belanja dan penggunaan SiLPA benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi petani dan nelayan. Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, tambahan belanja maupun pemanfaatan SiLPA diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki urgensi, berdampak langsung, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, tambahan belanja diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial dan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Anggaran urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meningkat sekitar Rp 122 miliar, dari Rp 1,88 triliun menjadi Rp 2 triliun.

Dalam bidang infrastruktur, Pemerintah Daerah memberikan prioritas pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang memiliki tingkat

urgensi tinggi dan memberikan dampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Belanja Infrastruktur Publik meningkat sekitar Rp 92 Miliar, dari sekitar Rp 733,3 Miliar menjadi Rp 825,3 miliar.

Dalam rangka penguatan ekonomi petani dan nelayan, Pemerintah Daerah mengarahkan belanja kepada program yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, dan ketahanan ekonomi masyarakat. Pemberian Pinjaman Daerah diberikan senilai Rp 2,1 Miliar kepada Gabungan Kelompok Tani Rp 1,5 Miliar dan dana bergulir nelayan Rp 600 juta sebagai bentuk keberpihakan riil kepada petani dan nelayan.

E. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan atas Pertanyaan, Saran, Himbauan serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Nasional Demokrat

1. Terhadap penurunan target Pajak Daerah Tahun 2026 sebesar 7,42 M dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. terdapat kenaikan target pajak sebesar Rp.3.212.000.000,00 (tiga miliar dua ratus dua belas juta rupiah) pada 2 jenis pajak BPHTB dan PBJT
 - b. terdapat penurunan target pajak sebesar Rp.10.630.555.916,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah) pada jenis pajak :
 - 1) Opsen PKB

disebabkan karena terdapat kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pemberian diskon sebesar 5% yang berlaku 20 Februari 2026 s.d 31 Desember 2026 atas besaran Pajak Kendaraan Bermotor

2) Opsen BBNKB

Penyesuaian target opsen BBNKB dengan mengacu trend realisasi pada tahun 2026 bulan Januari 2026 s.d 31 Juli 2026 dan hasil realisasi tahun 2025 yang hanya mencapai Rp.24.022.176.500,00 (dua puluh empat miliar dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau 82,74% dari target 2025

c. Atas kenaikan retribusi daerah sebesar Rp15,78 miliar adanya penyesuain target pendapatan BLUD dan beberapa OPD

d. Strategi optimalisasi peningkatan PAD dan Penanganan Piutang :

5) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6) Pemberian kebijakan insentif fiskal daerah kepada wajib pajak daerah melalui pembebasan denda PBB dan diskon pokok ketetapan piutang PBB;

7) Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kebumen melalui Surat Kuasa Khusus untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah;

8) Inventarisasi tanah / bangunan / aset idle yang dapat disewakan, dikerjasamakan, atau dikembangkan.

2. Terhadap penurunan penerimaan dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terkait kinerja dan kontribusi BUMD dapat kami sampaikan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Pada BUMD sektor perbankan, yaitu PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) dan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), penurunan dividen antara lain dipengaruhi oleh penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 yang mewajibkan BPR melakukan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Pembentukan cadangan tersebut berdampak terhadap beban dan laba bersih BPR, sehingga pencapaian laba tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap besaran dividen yang dapat dibagikan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Penurunan dividen Bank Jateng antara lain dipengaruhi oleh hasil RUPS Tahunan tanggal 27 Februari 2026, khususnya terkait kebijakan Dividend Payout Ratio (DPR) yang ditetapkan dalam RUPS. Kebijakan tersebut merupakan kewenangan RUPS dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan Provinsi Jawa Tengah selaku pemegang saham pengendali. Perubahan Dividend Payout Ratio tersebut berdampak

terhadap persentase laba yang dibagikan sebagai dividen, sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap besaran dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- c. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) terkait adanya indikasi permasalahan/fraud yang masih memerlukan pendalaman dan penanganan sesuai ketentuan, serta
- d. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) terkait dengan kredit sindikasi yang memerlukan pengawasan dan pengelolaan secara cermat. Kondisi tersebut menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja dan tata kelola BUMD.

Pemerintah Daerah akan terus melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap BUMD secara berkala, termasuk terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi laba dan dividen, serta mendorong peningkatan kinerja, penguatan tata kelola, pengelolaan risiko, dan optimalisasi kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- 3. Terhadap saran agar dilakukan evaluasi kinerja pos-pos pendapatan kami sampaikan terima kasih. Kami sependapat dengan hal tersebut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja serta menentukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Terkait permintaan agar kebijakan perencanaan belanja daerah disesuaikan dengan kondisi aktual dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah, kami sependapat dan menyampaikan apresiasi atas perhatian serta masukan yang diberikan.
5. Terhadap dukungan alokasi belanja pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, khususnya Pendidikan (34,96%) dan Kesehatan (19,41%), kami sampaikan terima kasih.
6. Terhadap harapan agar alokasi belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses infrastruktur, dengan tetap memperhatikan pemerataan wilayah dan kualitas pekerjaan, kami sependapat dan menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut.
7. Atas perhatian dan masukan Fraksi NasDem, kami menyampaikan terima kasih dan menjadikannya sebagai bahan penguatan dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

F. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Kami sampaikan Terima kasih atas saran dan masukan, penurunan target Pajak Daerah Tahun 2026 sebesar 7,42 M dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. terdapat kenaikan target pajak sebesar Rp3.212.000.000,00 (tiga miliar dua ratus dua belas juta rupiah) pada 2 jenis pajak BPHTB dan PBJT
 - b. terdapat penurunan target pajak sebesar Rp10.630.555.916,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah) pada jenis pajak :
 - Opsen PKB: disebabkan karena terdapat kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pemberian diskon sebesar 5% yang berlaku 20 Februari 2026 s.d 31 Desember 2026 atas besaran Pajak Kendaraan Bermotor
 - Opsen BBNKB: Penyesuaian target opsen BBNKB dengan mengacu trend realisasi pada tahun 2026 bulan Januari 2026 s.d 31 Juli 2026 dan hasil realisasi tahun 2025 yang hanya mencapai Rp24.022.176.500,00 (dua puluh empat miliar dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau 82,74% dari target 2025.

Untuk kenaikan retribusi daerah sebesar Rp15,78 miliar karena adanya penyesuaian target pendapatan BLUD dan beberapa OPD, sedangkan Strategi optimalisasi peningkatan PAD dan Penanganan Piutang :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Pemberian kebijakan insentif fiskal daerah kepada wajib pajak daerah melalui pembebasan denda PBB dan diskon pokok ketetapan piutang PBB;
 - Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kebumen melalui Surat Kuasa Khusus untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah;
 - Inventarisasi tanah / bangunan / aset idle yang dapat disewakan, dikerjasamakan, atau dikembangkan.
2. Terhadap perubahan proporsi belanja pada Perubahan APBD 2026, dapat kami sampaikan bahwa perubahan tersebut merupakan hasil penyesuaian kebutuhan belanja dengan perkembangan kondisi dan prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2026.
- Kenaikan belanja operasi dan belanja modal diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Sementara kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa terutama disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan riil, pemenuhan kewajiban belanja, serta dukungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Adapun penurunan belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi usulan, pemenuhan persyaratan penerima, serta prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami sependapat bahwa setiap perubahan alokasi belanja harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kebutuhan maupun hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diarahkan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan memiliki target output dan outcome yang jelas, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

3. Terhadap permintaan penjelasan pada Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD turun dari Rp2,936 miliar menjadi hanya Rp510,448 juta. Artinya berkurang sekitar Rp2,426 miliar atau $\pm 82,6\%$ dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi usulan, pemenuhan persyaratan penerima, serta mekanisme usulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi syarat dimana proposal usulan seharusnya telah di entri di SIPD H-1 dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim SKPD sebelum RKPD ditetapkan.

Adapun dasar Pemerintah Daerah memangkas sekitar 82,6% anggaran rehabilitasi PAUD mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan hasil evaluasi KPK.

4. Terhadap permintaan penjelasan terkait peningkatan pagu belanja sebesar Rp 24,67 M pada pelayanan dan penunjang BLUD di RSUD dr.Soedirman, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut karena ada penambahan target pendapatan sebesar Rp 16 M dan SiLPA sebesar Rp8.670.426.179,00. RSUD Dr Soedirman terus meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan, antara lain pelayanan baru yang akan berproses tahun ini yaitu Pelayanan layanan Catlab dan Kemoterapi.

Untuk waktu tunggu pasien mencapai 56,80 menit dengan standar SPM < 60 menit. Sedangkan untuk anggaran obat sudah dinaikan demi ketersediaan obat sampai dengan awal tahun. Nilai kepuasan masyarakat (SKM) meningkat dari 90,40 % menjadi 91,60 %.

5. Pencermatan terkait SiLPA, kami sependapat bahwa SiLPA yang cukup besar perlu menjadi bahan evaluasi, khususnya untuk memastikan apakah terbentuk karena efisiensi yang sehat atau karena belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk itu, evaluasi terhadap sumber dan komposisi SiLPA terus dilakukan sebagai bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan APBD ke depan.

Adapun pemanfaatan SiLPA sebagai sumber pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kebutuhan prioritas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen agar SiLPA ke depan tidak terjadi karena rendahnya penyerapan anggaran, tetapi lebih mencerminkan efisiensi dan pengelolaan APBD yang semakin baik.

6. Terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus selaras dengan KUPA dan PPAS yang telah disepakati bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, kami sepakat dan mengikuti proses sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

G. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Amanat Sejahtera

1. Terhadap saran agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen lebih berperan aktif lagi dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap badan-badan usaha milik daerah, kami sampaikan terimakasih atas saran dan masukannya serta akan kami upayakan agar badan usaha milik daerah dapat memberikan kontribusi untuk PAD.
2. Terhadap permintaan penjelasan Pemerintah Daerah agar dapat memperbaiki perencanaan di semua kegiatan yang akan dilakukan agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat baik itu infrastruktur, perekonomian, maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah sependapat bahwa tambahan belanja harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, khususnya dalam peningkatan infrastruktur, perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Daerah juga sependapat bahwa belanja yang tidak terserap secara optimal perlu menjadi bahan evaluasi, karena dapat mengurangi manfaat anggaran bagi masyarakat dan menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat kualitas perencanaan pada masing-masing perangkat daerah melalui penyusunan kegiatan berdasarkan kebutuhan riil, kesiapan pelaksanaan, target kinerja yang terukur, serta kemampuan pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran. Selain itu, monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga potensi kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih awal.

Pemerintah Daerah berkomitmen agar setiap anggaran yang dialokasikan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan output dan outcome yang optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

3. Terhadap permintaan dan penjelasan terkait Pemerintah Daerah tetap mengedepankan dan memprioritaskan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. terimakasih atas saran dan masukannya dan akan kami upayakan lebih baik lagi.
4. Terhadap permintaan dan penjelasan terkait SiLPA harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung dan terukur bagi masyarakat Kabupaten Kebumen, kami sampaikan terimakasih atas saran dan masukannya dan akan kami upayakan lebih baik lagi.

II. PENUTUP

Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf manakala Nota Jawaban/Tambahan penjelasan ini masih ada kekurangannya, namun kami berharap Jawaban dan Tambahan Penjelasan ini dapat lebih memperjelas hal-hal yang dipertanyakan.

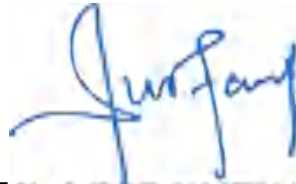
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Kebumen, 3 September 2026

BUPATI KEBUMEN



Hj. LILIS NURYANI